

Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Mewujudkan Desa Kreatif di Desa Pademawu Timur Pamekasan

Indien Winarwati¹, Achmad Syarifudin², Moh. Karim³, Tri Pujiati⁴, Achmad Badarus Syamsi⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: indien.winarwati@trunojoyo.ac.id¹, achmad.syarifudin@trunojoyo.ac.id², karim@trunojoyo.ac.id³, tri.pujiati@trunojoyo.ac.id⁴, badarus.syamsi@trunojoyo.ac.id⁵

Abstrak: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini berfokus pada kajian dan penguatan regulasi serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi desa. Kegiatan bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMDes dalam mewujudkan desa kreatif berbasis pariwisata di Desa Pademawu Timur, Kabupaten Pamekasan. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah belum optimalnya pemahaman pengelola BUMDes dan pemangku kepentingan desa terhadap peran, tata kelola, dan regulasi BUMDes dalam mendukung pelayanan sosial serta pengembangan ekonomi desa yang berkelanjutan. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan *community development* yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan, dengan melibatkan 28 peserta yang terdiri atas pengurus BUMDes, perangkat desa, pelaku UMKM, dan perwakilan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu: (1) sosialisasi peran dan regulasi BUMDes; (2) edukasi mengenai tata kelola BUMDes, *collaborative governance*, dan *entrepreneurial ecosystem*; serta (3) pelatihan dan pendampingan optimalisasi pengelolaan BUMDes berbasis pengembangan potensi wisata desa dan UMKM lokal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta terhadap posisi strategis BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, profesionalisme pengelolaan, dan keberlanjutan usaha. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan BUMDes, mendorong pengembangan wisata desa unggulan, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci : BUMDes, *Entrepreneurial Ecosystem*, Desa Wisata

Abstract: This Community Service Program (Pengabdian kepada Masyarakat/PKM) focuses on strengthening the regulatory framework and management capacity of Village-Owned Enterprises (BUMDes) as a strategic instrument for local economic development. The program aims to optimize BUMDes management in fostering a creative, tourism-based village in Pademawu Timur Village, Pamekasan Regency. The main challenges faced by the community partner include limited understanding among BUMDes managers and village stakeholders regarding the roles, governance mechanisms, and regulatory foundations of BUMDes in supporting social services and sustainable village economic development. The program employed a participatory and sustainable *community development* approach involving 28 participants, consisting of BUMDes managers, village officials, local MSME actors, and community representatives. The activities were implemented through three sequential stages: (1) socialization of BUMDes roles and regulatory frameworks; (2) educational sessions on BUMDes governance, *collaborative governance*, and the *entrepreneurial ecosystem*; and (3) training and mentoring on optimizing BUMDes management through the integration of village

tourism potential and local MSMEs. The results indicate a significant improvement in participants' awareness and understanding of BUMDes as a village economic institution oriented not only toward profit generation but also toward community empowerment, professional governance, and business sustainability. This program is expected to strengthen BUMDes institutional capacity, promote the development of competitive village-based tourism, and contribute to inclusive and sustainable improvements in community welfare and the local village economy.

Keywords: Village-Owned Enterprises (BUMDes), Entrepreneurial Ecosystem, Village Tourism

Pendahuluan

Pembangunan desa dalam satu dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, khususnya sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹ Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam aspek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk konkret implementasi Undang-Undang Desa adalah pemberian Dana Desa yang dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial masyarakat desa.² Untuk itu diperlukan identifikasi yang jelas terkait permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing desa sehingga pengembangan desa akan lebih optimal.³

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan desa dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, Undang-Undang Desa mengamanatkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).⁴ BUMDes diharapkan menjadi instrumen ekonomi desa yang mampu mengelola potensi lokal, mengembangkan usaha produktif, serta meningkatkan pendapatan asli desa. Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara berkelanjutan, dengan ketergantungan minimal terhadap bantuan pemerintah yang sifatnya hanya sebagai stimulus. Kegiatan ini pernah dilakukan oleh tim PKM di desa Masaingi.⁵ Hasil kegiatan menunjukkan bahwa perlu adanya koordinasi masyarakat desa dan perangkat desa untuk optimalisasi BUMDes. Begitu juga hasil kegiatan PKM yang dilakukan oleh tim PKM di

¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

² Debora Sanur, "Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Village Development Post Law No. 6 of 2014 on Villages", *Politica* 14 (1), 2023

³ Lumintang Juliana dan Fonny Jeane Waani, "Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu". *The Studies of Social Sciences* 2 (1):15-21, 2019. <https://doi.org/10.35801/tsss.2020.2.1.26895>.

⁴ Pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁵ Andi Indriani Ibrahim, Zakiyah Zahara, Rosida P. Adam, Nur Risky Islianty, Mohammad, Ega Nugraha, "Penguatan Kelembagaan Bumdes melalui Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Potensi Desa Masaingi", *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (YUMARY)* 5 (4): 857-865, 2025 <https://doi.org/10.35912/yumary.v5i4.3545>

desa Pariti menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes.⁶

Pembangunan desa mandiri dilaksanakan melalui tahapan perencanaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, mulai dari identifikasi potensi desa, analisis aset desa, hingga musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). BUMDes sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa memiliki peran strategis dalam mengelola usaha, memanfaatkan aset desa, mengembangkan investasi, serta menyediakan layanan ekonomi bagi masyarakat.⁷ Dalam konteks pembangunan desa, BUMDes dapat dikatakan sebagai ujung tombak penggerak ekonomi lokal. Salah satu sektor usaha yang banyak dikembangkan oleh BUMDes adalah sektor pariwisata, mengingat sektor ini memiliki potensi dan prospek yang sangat menjanjikan. Pariwisata desa tidak hanya meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga menimbulkan multiplier effect bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi pelaku UMKM di bidang transportasi, kuliner, dan akomodasi.⁸

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah dengan tingkat kunjungan wisatawan yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Salah satu wilayah yang memiliki potensi pariwisata cukup besar adalah Pulau Madura. Di Madura, sejumlah BUMDes telah berhasil mengelola destinasi wisata seperti Pantai Lon Malang di Kabupaten Sampang, Wisata Mangrove Kedatim di Kabupaten Sumenep, Edu Wisata Garam di Kabupaten Pamekasan, serta Pantai Telaga Biru di Kabupaten Bangkalan.⁹ Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata oleh BUMDes berpotensi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Namun demikian, pengelolaan pariwisata desa di Madura masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait dengan sinergi antar pemangku kepentingan (stakeholders). Peran dinas-dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebenarnya sudah berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Akan tetapi, belum terdapat kebijakan kolaboratif yang secara khusus mengatur kerja sama terpadu antara pemerintah desa, pemerintah daerah, BUMDes, dan pihak swasta dalam pengembangan pariwisata desa.

Ppendekatan *collaborative governance* menjadi sangat relevan, salah satunya melalui penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) antar stakeholder. Selain itu, pengembangan destinasi wisata desa membutuhkan ekosistem kewirausahaan

⁶ Anselmus Boy Baunsele, Erly G. Boelan, Gerardus Diri Tukan, Maximus M. Taek, Maria Agustin Lopes Amaral, Hildegardis Missa, Adri Gabriel Sooi, Alfry A. J. Sinlae, Paulus A. K. L. Ratumakin, and Adrianus Ketmoen, "Penguatan Kapasitas Pengelolaan BUMDes Di Desa Pariti, Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang-NTT". *Bakti Cendana* 6 (1):37-48, 2023. <https://doi.org/10.32938/bc.6.1.2023.37-48>.

⁷ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁸ <https://tirto.id/potensi-sektor-pariwisata-prospek-investasi-di-jawa-timur-gPTh>, diakses pada Mei 2024

⁹ Indien Winarwati dan Ach. Mus'if, "Pengembangan Desa Wisata Halal melalui Penguatan Hukum Kelembagaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa menuju DEWI CEMARA (Desa Wisata Cerdas Mandiri dan Sejahtera) ", Laporan Penelitian LPPM UTM Tahun 2021

(entrepreneurial ecosystem) yang kuat dan berkelanjutan.¹⁰ Ekosistem ini mencakup berbagai pilar seperti kebijakan pemerintah, sumber daya manusia, akses permodalan, pasar, budaya kewirausahaan, serta dukungan dari sektor publik dan swasta. Di Kabupaten Pamekasan, keberadaan pilar-pilar ekosistem kewirausahaan tersebut belum berfungsi secara optimal karena masih lemahnya koordinasi dan sinergi antar pilar. Akibatnya, dampak ekonomi dari pengelolaan wisata oleh BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat dan UMKM lokal masih belum signifikan.¹¹

Observasi awal dilakukan oleh tim PKM di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai desa kreatif berbasis pariwisata melalui penguatan pengelolaan BUMDes. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan, inovasi usaha, dan kolaborasi antar stakeholder. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi sangat relevan dan strategis untuk mendukung pengelolaan BUMDes dalam mewujudkan desa kreatif yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan di Desa Pademawu Timur Pamekasan. BUMDes sebagai pengelola usaha desa belum sepenuhnya berfungsi sebagai lembaga bisnis yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Permasalahan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDes, lemahnya perencanaan usaha berbasis potensi lokal, serta belum terbangunnya jejaring kemitraan yang kuat dengan pelaku usaha, UMKM, dan sektor swasta. Selain itu, pengembangan pariwisata desa di Pademawu Timur masih cenderung bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam satu konsep pengembangan desa kreatif. Aktivitas ekonomi masyarakat sekitar destinasi wisata belum sepenuhnya terhubung dengan rantai nilai pariwisata, sehingga manfaat ekonomi yang diterima masyarakat masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes belum mampu secara optimal berperan sebagai katalisator yang menghubungkan potensi wisata dengan penguatan ekonomi kreatif dan UMKM lokal.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *collaborative governance* merupakan pendekatan strategis dalam pengembangan desa wisata. Tata kelola pariwisata desa yang efektif hanya dapat terwujud melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan yang bersifat partisipatif, dialogis, dan berbasis kepercayaan.¹² Temuan serupa menyoroti pentingnya kolaborasi lintas aktor dalam pengembangan desa wisata berbasis adat, di mana peran masyarakat lokal menjadi aktor kunci dalam menjaga keberlanjutan nilai budaya dan

¹⁰ Indien Winarwati dan Moh. Karim, "Strategi Pengembangan Wisata Halal Madura Berbasis Collaborative Governance", Laporan Penelitian LPPM UTM Tahun 2022, Universitas Trunojoyo Madura, Madura, 2022.

¹¹ Indien Winarwati dan Moh. Karim, "Model Kebijakan Entrepreneurial Ecosystem BUMDes Pengelola Pariwisata dalam Meningkatkan Potensi UMKM di Pamekasan", Laporan Penelitian LPPM UTM Tahun 2023, Universitas Trunojoyo Madura, Madura, 2023.

¹² Laily Rochmatin, Slamet Muchsin, dan Sunariyanto, "Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata Kertosari." *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 16 (2), 2022 <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i02.16741>.

ekonomi desa.¹³ Secara empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor pendukung lainnya. Kolaborasi tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas kelembagaan desa, tetapi juga memperluas akses terhadap sumber daya, jaringan, dan inovasi dalam pengelolaan pariwisata desa¹⁴. Lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan ekowisata desa membutuhkan kepemimpinan lokal yang inklusif, komunikasi yang intensif, serta mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif agar mampu menciptakan keberlanjutan jangka panjang. Dalam konteks penguatan ekonomi desa, peran BUMDes menjadi sangat strategis sebagai motor penggerak pembangunan lokal.¹⁵

Namun demikian, realitas di banyak desa menunjukkan bahwa ketiadaan model pengelolaan BUMDes yang berbasis *collaborative governance* dan *entrepreneurial ecosystem* masih menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan desa kreatif. Sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat sering kali belum terbangun secara sistematis dan berkelanjutan. Akibatnya, potensi pariwisata desa belum mampu menciptakan nilai tambah ekonomi secara optimal, membuka lapangan kerja baru, maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Kondisi tersebut juga dihadapi oleh Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai desa kreatif berbasis pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya strategis melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes, peningkatan kompetensi pengelola, serta perancangan model pengelolaan desa kreatif berbasis pariwisata yang kolaboratif dan berkelanjutan. Kegiatan PKM ini diharapkan tidak hanya mampu mendorong optimalisasi peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa, tetapi juga menjadi solusi konkret dalam menjawab tantangan pembangunan desa kreatif di Desa Pademawu Timur secara partisipatif dan berkelanjutan.

¹³ Ahmad Erwin, "Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Adat di Desa Pekuncen." *Public Policy and Management Inquiry* 6 (2), 2022. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2022.6.2.6797>.

¹⁴ Akbar Robeth, Bambang Supriyono, dan Tjahjanulin Domai, "Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* 8 (2): 170-177, 2022 <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.5>.

¹⁵ Yelky Rudolf Lasampa dan Ardiyati, "Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Ekowisata di Nologaten." *Jurnal Ilmu Pemerintahan (JIPIKOM)* 7 (1): 106-113, 2023 . <https://doi.org/10.31289/jipikom.v7i1.5915>.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada bulan Oktober–November 2024 di Desa Pademawu Timur, Kabupaten Pamekasan. Metode pelaksanaan kegiatan dirancang secara partisipatif dan berkelanjutan, dengan melibatkan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perangkat desa, pelaku UMKM, serta masyarakat desa. Metode Pelaksanaan Kegiatan dengan Pendekatan *Community Development* Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Community Development* (Comdev), yang menempatkan masyarakat desa sebagai subjek utama pembangunan melalui proses pemberdayaan yang partisipatif, terencana, dan berkelanjutan. Kegiatan ini melibatkan 28 orang peserta, yang terdiri atas pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perangkat desa, pelaku UMKM, serta perwakilan masyarakat Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Pendekatan *Community Development* dipilih karena sejalan dengan tujuan kegiatan, yaitu memperkuat kapasitas kelembagaan BUMDes dalam mengelola potensi pariwisata dan ekonomi kreatif desa, serta mendorong terbentuknya desa kreatif yang mandiri dan berdaya saing. Pendekatan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan BUMDes, serta pengembangan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait.

Pelaksanaan PKM dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu sosialisasi, edukasi, serta pelatihan dan pendampingan.

1. Tahap Sosialisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tahap sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman awal serta membangun persepsi masyarakat mengenai pentingnya peran BUMDes dalam pembangunan dan perekonomian desa. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif dan diskusi kelompok.

Adapun kegiatan pada tahap ini meliputi:

- a) Pemberian pengetahuan mengenai konsep, fungsi, dan peran BUMDes dalam pembangunan desa.
- b) Pembentukan persepsi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya optimalisasi peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa.
- c) Penyampaian informasi terkait standarisasi pelayanan BUMDes, mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat.

2. Tahap Edukasi Peran BUMDes

Tahap edukasi bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta terkait aspek regulatif dan operasional BUMDes. Kegiatan dilakukan melalui ceramah, diskusi terarah (Focus Group Discussion/FGD), dan studi kasus yang disesuaikan dengan kondisi BUMDes Desa Pademawu Timur.

Kegiatan edukasi meliputi:

- a) Pemberian pemahaman mengenai ketentuan dan regulasi yang mengatur BUMDes.

- b) Edukasi mengenai peran BUMDes dalam tata kelola usaha dan pengelolaan keuangan desa.
 - c) Peningkatan pemahaman tentang kontribusi BUMDes dalam penyediaan pelayanan sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Tahap Pelatihan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan BUMDes
- Tahap pelatihan dan pendampingan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan praktis pengelola BUMDes serta mendorong keberlanjutan program. Metode yang digunakan meliputi pelatihan praktis, simulasi, dan pendampingan langsung.
- Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi:
- a) Pelatihan pengelolaan BUMDes yang mencakup perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, dan strategi pengembangan unit usaha.
 - b) Pendampingan dalam menjalin kemitraan dengan pihak eksternal, termasuk pelaku usaha dan UMKM lokal.
 - c) Pendampingan melalui pendekatan entrepreneurial ecosystem dalam pengembangan potensi wisata unggulan desa yang terintegrasi dengan UMKM lokal.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengukuran peningkatan pemahaman peserta dan keterlibatan aktif dalam pengelolaan BUMDes. Keberlanjutan program diwujudkan melalui pendampingan lanjutan, koordinasi dengan pemerintah desa, serta penguatan peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa berbasis potensi lokal.

Hasil dan Pembahasan

A. Tahap Sosialisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tahap sosialisasi merupakan tahap awal dalam rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dirancang dengan pendekatan *community development*, yaitu pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perubahan sosial dan ekonomi. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dasar, membangun kesadaran (*awareness*), serta membentuk persepsi dan komitmen bersama masyarakat terhadap peran strategis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan dan penguatan perekonomian desa.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif dan diskusi kelompok partisipatif dengan melibatkan 28 peserta, yang terdiri atas pengurus BUMDes, perangkat desa, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat Desa Pademawu Timur. Keterlibatan berbagai unsur tersebut mencerminkan prinsip utama *community development*, yaitu inklusivitas, partisipasi aktif, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan desa sejak tahap awal kegiatan. Dalam pelaksanaannya, tim PKM tidak hanya menyampaikan materi secara satu arah, tetapi juga mendorong dialog dua arah untuk menggali pengalaman, persepsi, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait

pengelolaan BUMDes, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara partisipatif dan kontekstual.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi dilaksanakan, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep, fungsi, dan peran strategis BUMDes. BUMDes cenderung dipersepsikan sebagai unit usaha desa yang bersifat administratif, dan belum sepenuhnya dipahami sebagai lembaga ekonomi desa yang mampu mengelola potensi lokal secara produktif dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang berpotensi menghambat optimalisasi peran BUMDes dalam pembangunan desa.

Melalui penyampaian materi mengenai konsep, fungsi, dan landasan hukum BUMDes, serta diskusi berbasis contoh praktik baik (*best practices*), peserta mulai memahami bahwa BUMDes merupakan badan hukum milik desa yang berperan sebagai penggerak ekonomi lokal, pengelola aset desa, dan sarana pemberdayaan masyarakat. Diskusi kelompok juga menunjukkan adanya perubahan sudut pandang peserta, di mana BUMDes mulai dipahami sebagai instrumen strategis yang dapat menghubungkan potensi desa, khususnya sektor pariwisata, dengan pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM lokal.

Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya tata kelola BUMDes yang baik melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan memberikan pemahaman baru bagi pengurus BUMDes dan perangkat desa. Peserta menyadari bahwa penerapan *good governance* dan standarisasi pelayanan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat legitimasi kelembagaan BUMDes, serta menjamin keberlanjutan usaha desa. Secara keseluruhan, tahap sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman awal dan membangun persepsi positif masyarakat terhadap peran BUMDes. Tahap ini menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan tahap selanjutnya, yaitu edukasi, pelatihan, dan pendampingan, karena keberhasilan penguatan dan optimalisasi BUMDes sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran, rasa memiliki (*sense of ownership*), serta partisipasi aktif masyarakat desa sebagai pemangku kepentingan utama.

B. Tahap Edukasi Peran BUMDes

Tahap edukasi merupakan tahapan lanjutan dari sosialisasi yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai aspek regulatif dan operasional BUMDes. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi terarah (Focus Group Discussion/FGD), dan studi kasus yang disesuaikan dengan kondisi nyata BUMDes Desa Pademawu Timur. Pendekatan ini memungkinkan peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam membahas permasalahan dan solusi terkait pengelolaan BUMDes.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa melalui pemberian pemahaman mengenai ketentuan dan regulasi yang mengatur BUMDes, peserta menjadi lebih sadar akan landasan hukum dan tata kelola yang wajib dipatuhi. Sebelum tahap edukasi, sebagian pengurus

BUMDes dan perangkat desa masih belum sepenuhnya memahami kewajiban legal maupun mekanisme pengelolaan administrasi BUMDes. Pemahaman yang meningkat ini penting untuk memastikan bahwa operasional BUMDes berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel.

Selain aspek regulatif, edukasi juga menekankan peran BUMDes dalam tata kelola usaha dan pengelolaan keuangan desa. Melalui diskusi dan studi kasus, peserta mampu memahami strategi pengelolaan unit usaha BUMDes, termasuk perencanaan usaha, pengelolaan arus kas, serta pemanfaatan aset desa secara optimal. Kegiatan ini memberikan wawasan praktis bagi pengurus BUMDes untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha dan meminimalkan risiko kegagalan usaha desa.

Lebih lanjut, peningkatan pemahaman tentang kontribusi BUMDes dalam penyediaan pelayanan sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat menunjukkan dampak positif terhadap kesadaran peserta. Peserta memahami bahwa BUMDes tidak semata-mata berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penyediaan lapangan kerja, pembinaan UMKM lokal, dan pengembangan potensi wisata desa. Kesadaran ini mendorong pengurus BUMDes dan masyarakat untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan BUMDes sebagai sarana pemberdayaan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, tahap edukasi berhasil memperkuat fondasi pemahaman peserta yang telah dibangun pada tahap sosialisasi. Peserta tidak hanya memahami konsep dan fungsi BUMDes, tetapi juga mampu mengaitkan regulasi, tata kelola usaha, dan kontribusi sosial dalam implementasi nyata. Hasil ini menjadi modal penting bagi tahap berikutnya, yaitu pelatihan dan pendampingan, di mana peserta akan menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara praktis untuk mengoptimalkan kinerja BUMDes di Desa Pademawu Timur.

C. Tahap Pelatihan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan BUMDes

Tahap pelatihan dan pendampingan dalam program ini dilaksanakan dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dan mendorong keberlanjutan usaha desa melalui penguatan keterampilan manajerial, keuangan, dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Pelatihan ini dilaksanakan dengan metode kombinasi antara teori, praktik, simulasi, dan pendampingan langsung di lapangan, sehingga peserta memperoleh pemahaman konseptual sekaligus pengalaman praktis.

Pelatihan pengelolaan BUMDes

Pelatihan pengelolaan BUMDes menekankan tiga aspek utama: (1) Perencanaan usaha, di mana peserta dibimbing dalam menyusun rencana usaha yang realistis, berbasis potensi desa, dan mempertimbangkan risiko serta peluang pasar; (2) Pengelolaan keuangan, termasuk pencatatan, pengendalian biaya, perencanaan kas, dan laporan keuangan sederhana, Hal ini terbukti membantu pengelola memahami arus kas BUMDes dan meningkatkan transparansi pengelolaan dana; (3) Strategi pengembangan unit usaha,

khususnya dalam memilih jenis usaha yang sesuai dengan potensi desa dan minat masyarakat, misalnya pariwisata, kuliner, dan kerajinan lokal.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa peserta pelatihan mampu menyusun rencana usaha yang lebih terstruktur dan realistis, serta lebih memahami pentingnya pencatatan keuangan yang rapi dan akuntabel. Responden menyatakan bahwa materi pelatihan meningkatkan keyakinan dan kesiapan mereka dalam mengelola BUMDes secara profesional.

Pendampingan Kemitraan Eksternal

Pendampingan dilakukan untuk mendorong BUMDes menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, seperti UMKM lokal, koperasi, dan pelaku usaha swasta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pengelola dalam: (1) Menyusun proposal kemitraan, (2) Menjalinkan komunikasi bisnis yang efektif, (3) Memanfaatkan jaringan lokal untuk pemasaran produk dan jasa.

Beberapa BUMDes berhasil membangun kemitraan strategis dengan UMKM kuliner dan kerajinan lokal, sehingga produk desa memiliki jalur distribusi yang lebih luas dan memperkuat integrasi ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan kemitraan berkontribusi pada peningkatan sinergi ekonomi desa dan memperkuat basis bisnis BUMDes.

Pendampingan Berbasis *Entrepreneurial Ecosystem*

Pendampingan menggunakan pendekatan *entrepreneurial ecosystem* difokuskan pada pengembangan potensi wisata unggulan desa yang terintegrasi dengan UMKM lokal. Pendekatan ini meliputi:

- (1) Identifikasi aset desa dan potensi wisata yang dapat dikembangkan,
- (2) Strategi kolaborasi antara BUMDes, pelaku usaha, dan masyarakat,
- (3) Pengembangan produk wisata dan paket layanan yang mendukung UMKM lokal.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa BUMDes yang mengikuti pendampingan berhasil:

- (1) Mengidentifikasi beberapa destinasi wisata yang memiliki nilai ekonomi tinggi,
- (2) Menyusun paket wisata yang melibatkan UMKM lokal (misal kuliner dan souvenir),
- (3) Meningkatkan kesadaran pengelola terhadap pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk keberlanjutan usaha.

Tahap pelatihan dan pendampingan terbukti efektif meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes. Materi praktis dan pendampingan langsung memberikan dampak nyata terhadap kemampuan pengelola dalam mengelola usaha, mengoptimalkan kemitraan, dan mengintegrasikan potensi lokal dalam strategi pengembangan BUMDes. Selain itu, pendekatan *entrepreneurial ecosystem* membantu BUMDes tidak hanya fokus pada aspek internal, tetapi juga membangun ekosistem kolaboratif yang mendukung pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, kombinasi pelatihan, simulasi, dan pendampingan memperkuat kompetensi pengelola, mendorong pengembangan unit usaha berbasis potensi lokal, dan meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Temuan ini sejalan

dengan literatur yang menyebutkan bahwa kapasitas manajerial dan kolaborasi lintas sektor merupakan faktor kunci keberhasilan BUMDes dalam menggerakkan ekonomi desa.



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDes

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan memberikan kontribusi strategis dalam upaya optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak pembangunan ekonomi desa. Melalui pendekatan partisipatif yang mencakup tahapan sosialisasi, edukasi, serta pelatihan dan pendampingan, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola BUMDes serta pemangku kepentingan desa terkait peran, tata kelola, dan pemanfaatan potensi BUMDes dalam pengembangan desa kreatif berbasis pariwisata.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman peserta mengenai posisi strategis BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelatihan dan pendampingan yang diberikan turut mendorong penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes, khususnya dalam aspek perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, pengembangan kemitraan, serta integrasi potensi wisata desa dengan aktivitas UMKM lokal.

Pengenalan pendekatan *collaborative governance* dan *entrepreneurial ecosystem* dalam kegiatan PKM ini menjadi landasan penting dalam membangun sinergi antara pemerintah desa, BUMDes, pelaku UMKM, masyarakat, dan pihak eksternal. Namun demikian, keberlanjutan pengembangan BUMDes dan desa kreatif di Desa Pademawu Timur masih memerlukan komitmen bersama, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pendampingan berkelanjutan agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara

lebih luas dan inklusif oleh masyarakat desa. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat menjadi model awal penguatan pengelolaan BUMDes berbasis potensi lokal yang kolaboratif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan desa kreatif di wilayah lain, khususnya di Kabupaten Pamekasan dan Pulau Madura.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trunojoyo Madura atas dukungan dan pendanaan yang diberikan sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Pademawu Timur, Kabupaten Pamekasan, pengurus BUMDes, serta seluruh masyarakat Desa Pademawu Timur atas kerja sama, partisipasi, dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan PKM, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi pengembangan desa.

Referensi

- Baunsele, Anselmus Boy, Erly G. Boelan, Gerardus Diri Tukan, Maximus M. Taek, Maria Agustin Lopes Amaral, Hildegardis Missa, Adri Gabriel Sooai, Alfry A. J. Sinlae, Paulus A. K. L. Ratumakin, and Adrianus Ketmoen, "Penguatan Kapasitas Pengelolaan BUMDes Di Desa Pariti, Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang-NTT". *Bakti Cendana* 6 (1):37-48, 2023. <https://doi.org/10.32938/bc.6.1.2023.37-48>.
- Erwin, Ahmad, "Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Adat di Desa Pekuncen." *Public Policy and Management Inquiry* 6 (2), 2022. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2022.6.2.6797>.
- <https://tirto.id/potensi-sektor-pariwisata-prospek-investasi-di-jawa-timur-gPTh>, diakses pada Mei 2024
- Ibrahim, Andi Indriani, Zakiyah, Zahara, Rosida, P. Adam, Nur Risky, Islianty, Mohammad, Ega Nugraha, "Penguatan Kelembagaan BUMDes melalui Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Potensi Desa Masaingi", *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (YUMARY)* 5 (4): 857-865, 2025 <https://doi.org/10.35912/yumary.v5i4.3545>
- Juliana, Lumintang, and Fonny Jeane Waani, "Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu". *The Studies of Social Sciences* 2 (1):15-21, 2019. <https://doi.org/10.35801/tsss.2020.2.1.26895>.
- Lasampa, Yelky Rudolf dan Ardiyati, "Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Ekowisata di Nologaten." *Jurnal Ilmu Pemerintahan (JIPIKOM)* 7 (1): 106-113, 2023 . <https://doi.org/10.31289/jipikom.v7i1.5915>.
- Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

- Robeth, Akbar, Supriyono, Bambang, dan Domai, Tjahjanulin "Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* 8 (2): 170-177, 2022
<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.5>.
- Rochmatin, Laily, Slamet Muchsin, dan Sunariyanto, "Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata Kertosari." *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 16 (2), 2022 <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i02.16741>.
- Sanur, Debora, "Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Village Development Post Law No. 6 of 2014 on Villages", *Politica* 14 (1), 2023
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Winarwati, Indien dan Karim, Moh., "Model Kebijakan *Entrepreneurial Ecosystem* BUMDes Pengelola Pariwisata dalam Meningkatkan Potensi UMKM di Pamekasan", Laporan Penelitian LPPM UTM Tahun 2023, Universitas Trunojoyo Madura, Madura, 2023
- Winarwati, Indien dan Karim, Moh., "Strategi Pengembangan Wisata Halal Madura Berbasis Collaborative Governance", Laporan Penelitian LPPM UTM Tahun 2022, Universitas Trunojoyo Madura, Madura, 2022
- Winarwati, Indien dan Mus'if, Ach., "Pengembangan Desa Wisata Halal melalui Penguatan Hukum Kelembagaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa menuju DEWI CEMARA (Desa Wisata Cerdas Mandiri dan Sejahtera)" Laporan Penelitian LPPM UTM Tahun 2021.